

## Mewujudkan Transparansi dan Efisiensi Belanja Negara Melalui Pengelolaan Keuangan Publik Yang Baik

Penulis: Eko Kurniawan, Anggun Wibowo, Rizki Fajar P.



Pengelolaan belanja pemerintah kerap kali menjadi permasalahan di berbagai negara, tak terkecuali di Asia Tenggara. Efisiensi dan transparansi merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan di dalam pengelolaan keuangan publik. Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) sebagai jaringan pembelajaran bersama yang fokus utama keahliannya pada penguatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi sistem manajemen keuangan publik di Kawasan Asia, hadir membantu pejabat di lingkup pemerintahan suatu negara untuk dapat memahami manajemen keuangan publik secara lebih baik lagi.

Untuk kesekian kalinya, PEMNA kembali menyelenggarakan Budget Communities of Practice (B-CoP) pada tanggal 4-5 Oktober 2023, dimana yang menjadi tuan rumah adalah Kementerian Keuangan Timor Leste. Dalam acara tersebut, negara-negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam, Mongolia, Korea Selatan, serta perwakilan dari beberapa Lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), International Budget Partnership (IBP), Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), serta La'o Hamutuk (IBP's CSO Partner in Timor Leste).

Beberapa poin krusial dari para pemateri dapat dijadikan landasan oleh Kementerian Keuangan dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan publik. Diantaranya meliputi bagaimana aktor-aktor dapat melakukan monitoring atas pelayanan publik secara baik, termasuk di dalamnya adalah melalui pengukuran kinerja. Hal tersebut dapat ditempuh antara lain melalui implementasi disiplin fiskal, pengalokasian sumber daya untuk kepentingan strategis, penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai prioritas strategis, akuntabilitas dalam menggunakan sumber daya, serta diskusi secara intensif antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran kinerja di dalam pengelolaan keuangan publik memiliki banyak keuntungan, yaitu antara lain: (i) membantu untuk memperkuat kontrak sosial antara penyelenggara negara dengan masyarakat; (ii) menciptakan debat di ruang publik dalam mengaitkan antara isu-isu Kebijakan fiskal dengan program-program prioritas masyarakat dan

memberian layanan publik; dan (iii) berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta membantu menghubungkan proses perencanaan dengan penganggaran secara lebih efektif.

Dari sisi transparansi anggaran dan partisipasi publik, beberapa masukan dan saran perbaikan dari narasumber lembaga internasional serta negara sejawat dapat dijadikan *benchmark* oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Mereka menekankan betapa pentingnya digitalisasi dalam proses penyusunan anggaran. Penggunaan platform digital dapat mulai diimplementasikan pada tahapan diseminasi dan penyingkapan informasi publik, konsultasi publik, konsultasi terkait perundangan, *participatory budgeting*, monitoring dan evaluasi proyek, serta penyampaian keluhan oleh masyarakat. Secara lebih mendalam, penggunaan platform digital dapat dilaksanakan pada tahap penyusunan anggaran (antara lain melalui *Fiscal Openness Accelerator* (FOA) seperti yang dilakukan oleh Nigeria, Afrika Selatan, dan Benin), proses konsultasi perundangan (melalui rapat dengar pendapat), pelaksanaan anggaran (melalui penyediaan untuk menyampaikan keluhan publik, serta proses konsultasi dan kolaborasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi Pelayanan publik), proses audit dan pengawasan anggaran (melalui penyampaian hasil audit kepada masyarakat oleh Badan Audit). Keseluruhan proses tersebut akan membawa manfaat positif, yaitu antara lain peningkatan penerimaan pajak, memperbesar proses pengawasan oleh publik kepada Lembaga pemerintah, meningkatkan kredibilitas anggaran, serta memperbaiki sasaran-sasaran pembangunan.

Masukan, saran, dan rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk dapat melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan publik, sebagaimana juga perbaikan pada aspek transparansi anggaran dan partisipasi publik, yang secara tidak langsung akan berdampak pula pada perbaikan tata Kelola negara. Dalam menjalankan misi tersebut, tentunya diperlukan dukungan dari tidak hanya pemerintah, namun juga partisipasi masyarakat secara lebih luas.



# Realisasi APBN s.d. 30 September 2023

Uraian (triliun rupiah)	2022				2023			
	Growth s.d. 30 Sep (y-o-y, %)	APBN	Real s.d. 30 Sep	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Growth m-o-m (%)	Growth m-t-m (%)	
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	▲ 45,7	2.463,0	2.035,6	82,6	▲ 3,1	▲ 1,7	▲ 3,2	
I. Penerimaan Perpajakan	▲ 49,3	2.021,2	1.583,3	78,3	▲ 2,6	▲ 0,1	▲ 3,2	
1. Penerimaan Pajak	▲ 54,2	1.718,0	1.387,8	80,8	▲ 5,9	▲ 1,6	▲ 2,1	
2. Kepabeanan & Cukai	▲ 26,9	303,2	195,6	64,5	▼ (15,8)	▼ (7,5)	▲ 10,1	
II. PNBPN	▲ 34,5	441,4	451,5	102,3	▲ 4,6	▲ 6,9	▲ 3,2	
III. Hibah	▼ (41,6)	0,4	0,7	180,7	▲ 23,3	▲ 135,0	▼ (30,3)	
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	▲ 5,9	3.061,2	1.967,9	64,3	▲ 2,8	▲ 14,1	▲ 37,4	
I. Belanja Pemerintah Pusat	▲ 7,6	2.246,5	1.396,9	62,2	▲ 2,6	▲ 23,5	▲ 50,3	
1. Belanja K/L	▼ (8,1)	1.000,8	669,6	66,9	▼ (0,7)	▼ (10,8)	▼ (0,9)	
2. Belanja non-K/L	▲ 29,2	1.245,6	727,3	58,4	▲ 5,9	▲ 63,5	▲ 123,9	
II. Transfer Ke Daerah	▲ 2,1	814,7	571,0	70,1	▲ 3,3	▼ (9,0)	▲ 6,5	
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	▲ 271,4	(156,8)	389,7	(248,6)	▲ 14,7	▲ 1.007,4	▼ (217,1)	
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	▲ 113,5	(598,2)	67,7	(11,3)	▲ 10,6	▲ 70,4	▲ 1.164,9	
<b>% thd PDB</b>		(2,84)	0,32					
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	▼ (30,6)	598,2	163,0	27,2	▼ (62,3)	▼ (98,0)	▼ (105,8)	
<b>SILPA/(SIKPA)</b>			230,7					

Sumber: Kementerian Keuangan

## Leading Indicators yang Berpengaruh terhadap Postur APBN

Di tengah dinamika ketidakpastian global, stabilitas perekonomian domestik relatif terjaga di bulan September 2023. Tingkat inflasi masih tetap terjaga, dengan didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung stabil dalam beberapa bulan terakhir. Namun, konsumsi masyarakat yang direpresentasikan oleh indikator IKK dan IPR masih menunjukkan kecenderungan lebih kuat jika di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun turun jika di bandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, aktivitas ekonomi juga tetap solid yang terlihat dari PMI manufaktur yang masih berada di zona ekspansif selama 25 bulan berturut-turut hingga September 2023. Di sisi lain, gejolak sektor keuangan global kembali memberikan tekanan pada pasar keuangan Indonesia, yang terlihat dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta peningkatan suku bunga SBN 10 tahun. Dari sisi eksternal, volatilitas harga komoditas terus berlanjut di sepanjang tahun 2023. Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan pada September 2023, antara lain dipengaruhi oleh berlanjutnya pemotongan produksi minyak oleh Arab Saudi dan Rusia. Sementara itu, harga komoditas lain, seperti CPO dan batubara justru mengalami penurunan. Harga CPO turun pada September 2023 dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan persediaan minyak sawit dunia dan penurunan harga minyak nabati lainnya. Turunnya harga CPO, berpengaruh terhadap besaran tarif Bea Keluar CPO dan Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah menjadi masing-masing sebesar US\$33/MT dan US\$85/MT. Selain itu, harga batubara juga mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama dipengaruhi oleh menurunnya permintaan di pasar Tiongkok dan India. Gejolak ekonomi global juga berpengaruh terhadap *supply-demand* negara-negara mitra dagang Indonesia yang berpengaruh terhadap turunnya ekspor dan impor. Meskipun begitu, penurunan ekspor masih dapat meng *offset* penurunan impor sehingga neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus dalam 41 bulan terakhir.

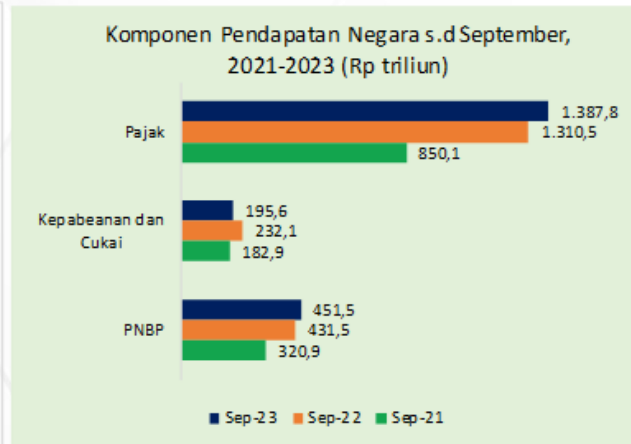
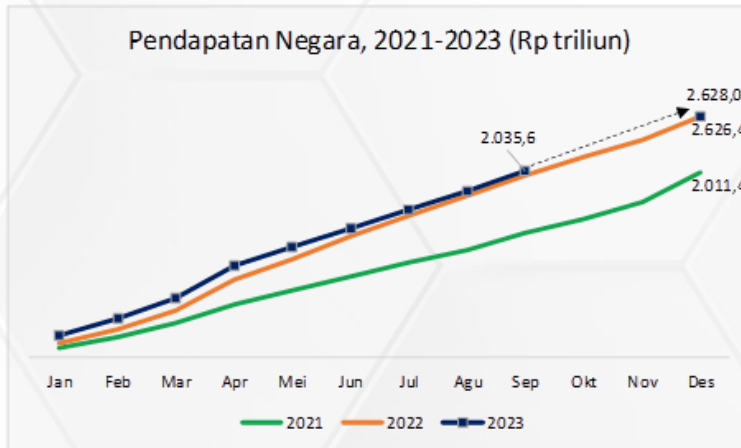
SEKTOR RIIL	Sep-23	mtm (%)	yoy (%)	Pengaruh
1. Inflasi (% , ytd)	1,63	▲ 0,19	▲ 2,28	• PPh • PPN • PNBPN K/L
2. Indeks Penjualan Riil	200,2	▼ 3,9	▲ 2,1	• PPh • PPN • Cukai
3. Indeks Keyakinan Konsumen	121,7	▼ 3,5 poin	▲ 4,5 poin	• PPh • PPN • Cukai
4. PMI Manufaktur Indonesia	52,3	▼ 1,6 poin	▼ 1,4 poin	• PPN • PPh • PNBPN SDA
SEKTOR MONETER	Sep-23	Mtm (%)	Yoy (%)	Pengaruh
1. Nilai Tukar (Rp/US\$)	15.345	▼ 0,7	▼ 2,6	• Perpajakan • PNBPN SDA • Subsidi dan Kompensasi
2. Yield SUN-10 Thn (%)	6,57	▲ 0,06 poin	▼ 0,71 poin	• Belanja Bunga Utang • Pembiayaan Anggaran (Utang)
SEKTOR EKSTERNAL	Sep-23	Mtm (%)	Yoy (%)	Pengaruh
1. ICP (US\$/brl)	90,17	▲ 9,2	▲ 4,8	• PPh Migas • PNBPN SDA • Subsidi dan Kompensasi • Transfer ke Daerah
2. HBA (US\$/t)	133,13	▼ 26,0	▼ 58,3	• PNBPN SDA • Transfer ke Daerah
3. Harga CPO (US\$/MT)	798,83	▼ 2,6	▼ 5,6	• Bea Keluar • PNBPN BLU
4. Ekspor (US\$ miliar)	20,76	▼ 5,6	▼ 16,2	• Bea keluar • PNBPN SDA • Transfer ke Daerah
5. Impor (US\$ miliar)	17,34	▼ 8,2	▼ 12,5	• Bea Masuk • Belanja Barang • Belanja Modal • Subsidi dan Kompensasi
6. Neraca perdagangan (US\$ miliar)	3,42	▲ 9,6	▼ 31,2	• Bea keluar • PNBPN SDA • Transfer ke Daerah

Sumber: consensus survey

## PENDAPATAN NEGARA

"Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2023 masih dapat Dijaga di Level Positif"

Sampai dengan 30 September 2023, pendapatan negara masih tumbuh positif meskipun mengalami normalisasi dengan pertumbuhan sebesar 3,1 (yoy) atau mencapai Rp2.035,6 triliun (82,6% terhadap APBN 2023). Kinerja tersebut utamanya dikontribusikan dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Kinerja penerimaan perpajakan tumbuh 2,6% dipengaruhi terutama oleh aktivitas produksi dan konsumsi, implementasi dampak kebijakan (UU HPP), serta masih terjaganya harga komoditas. Sementara itu, PNBP juga mampu meningkat sebesar 4,6% (yoy) dipengaruhi terutama PNBP SDA nonmigas dan setoran dividen BUMN. Di sisi lain, untuk realisasi hibah mencapai Rp0,7 triliun yang dikontribusikan baik dari hibah dalam negeri (yang berasal dari pemerintah daerah) maupun hibah luar negeri.



Sumber: Kementerian Keuangan

## Sampai dengan 30 September 2023, Moderasi Penerimaan Perpajakan Terus Berlanjut

Sampai dengan 30 September 2023, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp1.583,3 triliun. Capaian tersebut masih tumbuh positif meskipun termoderasi atau sebesar 2,6% (yoy) didukung kinerja positif penerimaan pajak. Selama periode Januari sampai dengan September 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.387,8 triliun atau tumbuh 5,9% (yoy). Capaian penerimaan pajak tersebut masih tumbuh positif meskipun PPh 22 Impor, PPN Impor, serta PPh Final menunjukkan kontraksi yang lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. PPh 22 Impor dan PPN Impor berkontraksi terutama dipengaruhi penurunan nilai impor terutama akibat moderasi harga minyak bumi. Sementara itu, meskipun PPh Final masih berkontraksi karena basis tahun lalu yang tinggi dampak PPS, namun secara bulanan menunjukkan pertumbuhan positif sejak bulan sebelumnya. Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor utama masih menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor pertambangan masih menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi hingga September 2023 meskipun secara bulanan mengalami kontraksi karena penurunan angsuran PPh Badan sejalan proyeksi penurunan profit perusahaan. Sementara itu, meskipun secara akumulatif sektor industri pengolahan masih tumbuh positif namun sektor tersebut secara bulanan mengalami kontraksi yang lebih dalam pada bulan September 2023. Hal ini dipengaruhi peningkatan restitusi pada industri pengolahan logam dasar.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan 30 September 2023 telah mencapai Rp195,6 triliun atau 64,5% terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut berkontraksi sebesar 15,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan meskipun sangat tipis. Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai akhir September 2023 mampu mencapai Rp150,6 triliun atau 61,3% terhadap target APBN 2023. Kinerja cukai tersebut berkontraksi sebesar 5,2% yang disebabkan karena penurunan produksi hasil

tembakau utamanya dari SKM dan SPM golongan I. Dari sisi Penerimaan bea masuk, kinerja positif masih berlanjut meskipun semakin termoderasi dengan mencapai Rp36,9 triliun atau 77,6% terhadap target APBN 2023. Kinerja tersebut tumbuh 1,7% yang disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, peningkatan tarif rata-rata bea masuk dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta *extra effort* melalui kegiatan penelitian dokumen impor, penelitian ulang dokumen impor, dan audit kepabeanan. Dari sisi komoditas kontributor bea masuk terbesar yang menjadi pengungkit pertumbuhan adalah kendaraan, suku cadang kendaraan, besi dan baja dasar serta barang modal berupa mesin untuk keperluan pertambangan, penggalian, dan konstruksi. Sementara harga komoditas yang termoderasi terutama dari CPO berdampak pada bea keluar, sampai dengan 30 September 2023 berkontraksi 79,4% atau mencapai Rp8,1 triliun. Kinerja tersebut juga dipengaruhi penyesuaian tarif BK mineral seiring dengan progres hilirisasi SDA.

Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 September 2021, *outlook* perpajakan sampai dengan tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai target APBN, meskipun cukup berat guna mencapai target *outlook* Lapsem dengan beberapa catatan sebagai berikut. Untuk komponen pajak, diperkirakan akan dapat mencapai target *outlook* sebesar Rp1.820,4 triliun meskipun memiliki risiko terutama berkaitan dengan perkembangan asumsi makro yaitu harga komoditas global yang lebih rendah tahun sebelumnya. Namun demikian, akan diupayakan strategi optimalisasi perluasan basis pemajakan dan penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Untuk kepabeanan dan cukai, terdapat risiko target APBN maupun *outlook* Lapsem tidak dapat dicapai yang dipengaruhi oleh pelaksanaan PMK 71/2003 tentang BK olahan mineral logam, harga CPO yang menurun, dan *shifting* produksi rokok yang menurun, serta belum dipungutnya objek cukai baru.

Secara rinci penerimaan perpajakan dan *forward looking* dapat dilihat pada link <https://bit.ly/DashboardPerpajakanLenteraOktober2023>

## Kinerja PNPB s.d. September 2023 Masih Didukung oleh Pendapatan SDA dan Pendapatan KND

Realisasi PNPB sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp451,5 triliun atau 102,3% dari APBN 2023, tumbuh 4,6 persen (yoy). Kinerja positif ini terutama didorong oleh tingginya Pendapatan SDA terutama SDA Nonmigas terutama dari sektor minerba dan Pendapatan KND terutama dari setoran dividen BUMN.

Realisasi Pendapatan SDA Migas sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp87,6 triliun atau 66,8% dari APBN 2023, mengalami kontraksi 20,1% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan *lifting* minyak bumi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata ICP periode Januari - September 2023 mencapai US\$77,7/barel (2022: US\$101,3/barel). Sementara itu, pada periode Januari - Agustus 2023 rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 598,5 ribu barel/hari (2022: 610,4 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 967,1 ribu barel/hari (2022: 953,4 ribu barel/hari).

Pendapatan SDA Nonmigas menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp106,5 triliun atau 164,4% dari APBN 2023, tumbuh sebesar 52,3% (yoy). Kenaikan ini didukung oleh Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang tumbuh 57,8% (yoy) terutama disumbang oleh iuran produksi/royalti batu bara dampak dari implementasi PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengubah tarif maksimal royalti batubara dari 7% menjadi 13,5%. Realisasi Pendapatan SDA panas bumi juga mengalami pertumbuhan positif 29,8% (yoy) disebabkan oleh kenaikan bagian pemerintah dari penjualan listrik. Sementara itu, realisasi Pendapatan SDA Kehutanan terkontraksi 1,9% (yoy) antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan KLHK. Realisasi Pendapatan SDA Perikanan juga mengalami kontraksi 76,2% (yoy) antara lain disebabkan oleh perubahan metode perhitungan PNPB PHP Praproduksi menjadi Pascaproduksi dimana wajib bayar akan menghitung kewajiban PNPB-nya pada saat mendaratkan ikan.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 September 2023 mencapai sebesar Rp70,7 triliun atau 144,0% dari APBN 2023, tumbuh 74,2% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan dan beberapa BUMN Nonperbankan antara lain PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, serta PT Pelabuhan Indonesia.

Realisasi PNPB Lainnya sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp121,0 triliun atau 106,8% dari APBN 2023, terkontraksi 15,9% (yoy). Realisasi ini terdiri dari realisasi Pendapatan PNPB K/L yang tumbuh sebesar 6,7% (yoy) terutama berasal dari kenaikan pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta hasil Tipikor, pendapatan layanan administrasi hukum (Visa, Paspor, dll), serta pendapatan jasa transportasi. Sementara itu, realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) terkontraksi 43,4% (yoy) dan realisasi Pendapatan DMO terkontraksi 78,7% (yoy) yang disebabkan oleh tren penurunan harga komoditas terutama minyak bumi.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp65,7 triliun atau 79,1% dari APBN 2023, terkontraksi 2,8% (yoy). Penurunan ini terutama berasal dari turunnya Pendapatan pengelolaan dana perkebunan sawit akibat tren penurunan harga CPO dampak dari penurunan *demand* dikarenakan telah pulihnya *supply* minyak nabati. Sementara itu, Pendapatan BLU Nonsawit pada beberapa K/L menunjukkan kinerja positif antara lain Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan antara lain pada satker BLU di Kemenkeu (LMAN, BPDPKS, PIP, dst).

Berdasarkan kinerja PNPB sampai dengan bulan September tahun 2023, diperkirakan sampai akhir tahun 2023 terdapat potensi tambahan realisasi PNPB dibandingkan target APBN 2023, terutama berasal dari tambahan setoran Pendapatan KND dan Pendapatan SDA Nonmigas sektor minerba. Namun terdapat tantangan dalam pencapaian target tersebut antara lain volatilitas perekonomian terutama harga komoditas energi serta perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada realisasi PNPB. Beberapa kebijakan yang akan diambil dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target antara lain dilakukan melalui penguatan pengawasan atas pengelolaan PNPB, implementasi ABS untuk piutang PNPB SDA dan PNPB pada KL lainnya, pengembangan SIMBARA untuk bauksit dan nikel serta integrasi data dengan Kementerian Perindustrian.

### BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara s.d. September tahun 2023 mencapai Rp1.967,9 triliun (64,3% dari APBN tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun) atau lebih tinggi 2,6% dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2022. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.396,9 triliun (62,2% dari APBN 2023) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp571,0 triliun (70,1% dari APBN tahun 2023).

## Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Dimanfaatkan untuk Berbagai Program Strategis

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.396,9 triliun tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L dan belanja non-K/L. Realisasi belanja K/L mencapai sebesar Rp669,6 triliun (66,9% dari APBN tahun 2023), lebih rendah 0,7% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp674,4 triliun. Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran berbagai program perlindungan sosial a.l. PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, BOS, dan KIP Kuliah, dan bantuan bencana; (2) pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, jaringan irigasi; pengadaan peralatan/mesin; pemeliharaan jalan. Selanjutnya, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp727,3 triliun (58,4% dari APBN tahun 2023), meningkat 5,9% dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp686,6 triliun. Belanja non-K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi.

Kinerja realisasi belanja K/L s.d. September tahun 2023 terutama disumbangkan oleh tingginya realisasi belanja modal sebesar 19,4% terhadap realisasinya tahun lalu. Di samping itu, realisasi Belanja Pegawai s.d. September tahun 2023 juga tumbuh sebesar 1,2% terhadap realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Adapun penjelasan kinerja belanja K/L menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi belanja pegawai K/L mencapai sebesar Rp192,6 triliun (70,6% dari APBN tahun 2023), meningkat 1,2% dari realisasinya tahun lalu. Realisasi belanja pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp129,1 triliun dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya. sebesar Rp63,5 triliun. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk untuk penyaluran THR dan gaji-13 pada bulan April dan Juni tahun 2023.

Kemudian, realisasi belanja barang K/L mencapai Rp245,0 triliun (65,5% dari APBN tahun 2023), lebih rendah 6,2% dari periode yang sama pada tahun 2022, utamanya dipengaruhi pengelolaan dana kelapa sawit dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2022 yang relatif besar. Realisasi belanja barang tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pemeliharaan/perawatan BMN pada Kemenhan dalam rangka mendukung alutsista pada Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Umum Integratif; (2) pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional pada KemenPUPR; (3) pengadaan/dukungan logistik dan pelayanan kesehatan pada POLRI, (4) penyaluran dana BOS pada Kemenag; dan (5) pembentukan Badan *Ad hoc* dalam rangka kegiatan tahapan Pemilu 2024 pada KPU.

Selanjutnya, realisasi belanja modal mencapai Rp127,3 triliun (60,5% dari APBN tahun 2023), tumbuh sebesar 19,4 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kinerja realisasi Belanja Modal tersebut dipengaruhi antara lain oleh: (1) belanja modal belanja peralatan dan mesin antara lain pengadaan alat material khusus (almatsus) oleh POLRI, pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) pada Kemenhan, dan pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan BIN; (2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi,

preservasi jalan dan jembatan oleh PUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kemenhub; (3) belanja modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh KemenPUPR, terminal bandara oleh Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi oleh Kemendikbudristek, rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan, dan rusun prajurit TNI & Polri.

**Realisasi bantuan sosial mencapai 104,59 triliun (72,87% dari Pagu) atau terkontraksi 9,99% (yoy)** yang dipengaruhi pelaksanaan penebalan bantuan sosial berupa penyaluran BLT BBM yang mulai salur pada September 2022 namun tidak berlanjut ke tahun 2023. Belanja bantuan sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan sosial pada Kemensos sebesar Rp50,0 triliun a.l. untuk PKH bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran program kartu sembako untuk 18,5 juta KPM; (2) penyaluran bantuan sosial pada Kemenkes sebesar Rp34,7 triliun untuk pembayaran bantuan iuran kepada 96,7 juta PBI JKN; (3) penyaluran bantuan PIP bagi 12,3 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 729,3 ribu mahasiswa dengan total realisasi sebesar Rp15,80 triliun pada Kemendikbudristek dan sebesar Rp2,25 triliun pada Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB sebesar Rp1,8 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

**Realisasi belanja non-K/L s.d. September tahun 2023 terutama disumbangkan oleh pembayaran bunga utang, pembayaran pensiun, serta penyaluran subsidi.** Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp117,6 triliun, meningkat sebesar 4,8% terhadap realisasinya tahun lalu sebesar Rp112,2 triliun disumbangkan oleh meningkatnya jumlah penerima pensiun PNS daerah menjadi kurang lebih 2,1 juta orang. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp322,0 triliun (73,0% dari APBN tahun 2023) atau meningkat 15,6% terhadap realisasinya tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja subsidi mencapai Rp157,0 triliun (52,6% dari APBN tahun 2023), atau lebih rendah 6,1% dibandingkan realisasinya di periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) subsidi energi sebesar Rp103,1 triliun, mencakup subsidi BBM sebesar Rp13,9 triliun untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 11,8 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar Rp46,5 triliun untuk penyaluran 5,4 juta MT, dan subsidi listrik sebesar Rp42,7 triliun untuk 39,5 juta pelanggan; dan (b) subsidi nonenergi sebesar Rp53,9 triliun, a.l. untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 3,2 juta debitur dengan total penyaluran KUR sebesar Rp175,7 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 151,3 ribu unit rumah. Selain itu, realisasi belanja non-K/L juga dimanfaatkan untuk pembayaran kompensasi BBM sebesar Rp81,5 triliun dan pembayaran kompensasi listrik sebesar Rp35,2 triliun, serta pelaksanaan program Kartu Prakerja sebesar Rp3,7 triliun bagi 1,0 juta peserta pelatihan.

**Memperhatikan kinerja Belanja Pemerintah Pusat s.d. September,** Pemerintah perlu menjaga dan mendorong kinerja belanja Pemerintah Pusat, terutama melalui belanja K/L

agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. Pemerintah tetap menjaga komitmen membangun IKN. Sampai dengan September tahun 2023 telah direalisasikan dukungan anggaran sebesar Rp10,7 triliun untuk: (1) pembangunan *cluster* infrastruktur sebesar Rp8,6 triliun antara lain pembangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan-Kemenko-Kemsetneg, rumah tapak hunian Menteri, pembangunan sarpras Pemerintahan IKN, SPAM IKN, pembangunan embung KIPP, pengendali banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, pembangunan jalan sumbu kebangsaan, pembangunan jalan tol IKN, pembangunan jalan akses bandara; dan (2) klaster noninfrastruktur sebesar Rp2,08 triliun untuk survei pembangunan mabes TNI, dukungan pengamanan pembangunan IKN oleh POLRI, promosi investasi proyek prioritas, penataan dan pengelolaan BMN, serta operasional Otorita IKN.

## TKD Dimanfaatkan antara lain untuk Mendukung Pendanaan Layanan Publik di Daerah, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

**Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp571,0 triliun atau 70,1% dari pagu APBN tahun 2023,** lebih tinggi dibandingkan realisasinya terhadap periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp552,7 triliun (68,7%). Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran pada seluruh jenis TKD yang lebih baik.

**Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 30 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp77,0 triliun atau 56,5% dari pagu.** Realisasi tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 20,2% (yoy) terutama disebabkan oleh kenaikan pagu DBH SDA pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp95,8 triliun dibandingkan pagu tahun 2022 sebesar Rp61,6 triliun. Realisasi penyaluran DBH tersebut meliputi realisasi DBH Pajak sebesar Rp30,8 triliun dan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp46,2 triliun.

**Selanjutnya, realisasi penyaluran DAU sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp302,8 triliun atau 76,5% dari pagu,** lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp309,4 triliun (81,8%) terutama dipengaruhi oleh kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran DAU yang Ditetapkan Penggunaannya secara lengkap. Penyaluran DAU yang Tidak Ditetapkan Penggunaannya dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu. Penyaluran DAU yang Ditetapkan Penggunaannya yaitu: (1) DAU penggajian formasi PPPK dilakukan setiap bulan sesuai laporan pengangkatan dan pembayaran gaji PPPK yang diangkat di tahun 2023; (2) DAU

pendanaan kelurahan disalurkan dua tahap; serta (3) DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum disalurkan tiga tahap. Penyaluran DAU yang Ditetapkan Penggunaannya dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q DJPK menerima laporan syarat penyaluran berupa laporan rencana anggaran dan laporan realisasi masing-masing jenis DAU yang Ditetapkan Penggunaannya.

**Mulai tahun 2023 DAK terdiri atas: (1) DAK Fisik, (2) DAK Nonfisik, dan (3) Hibah kepada Daerah. Sampai dengan 30 September 2023,** realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp24,4 triliun atau 45,6% dari pagu, secara nominal lebih rendah namun secara persentase lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada periode yang sama di tahun 2022 sebesar Rp25,4 triliun (41,7%). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kecepatan penyelesaian kontrak pekerjaan pada beberapa bidang DAK Fisik.

**Sementara itu, DAK Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp98,9 triliun atau 75,9% dari pagu,** lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp84,7 triliun (65,8%). Realisasi DAK Nonfisik utamanya dipengaruhi oleh kinerja penyampaian syarat salur dari pemerintah daerah dan rekomendasi penyaluran dana dari masing-masing K/L pengampu DAK Nonfisik.

**Hibah kepada Daerah sampai dengan 30 September 2023 telah tersalurkan sebesar Rp1,4 triliun atau 69,0% dari pagu.** Hibah kepada Daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.

**Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sampai dengan tanggal 30 September 2023 telah tersalurkan sebesar Rp9,9 triliun atau 57,1% dari pagu** terdiri atas: (a) Dana Otsus Aceh sebesar Rp2,5 triliun atau 62,7% dari pagu; serta (b) Dana Otsus dan DTI Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp7,4 triliun atau 55,5% dari pagu yang ditujukan bagi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

**Selanjutnya, Dana Keistimewaan D.I.Y telah terealisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 76,7% dari pagu,** sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2022 sebesar 80,0%. Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Dana Keistimewaan D.I.Y digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

**Sampai dengan 30 September 2023, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp52,8 triliun atau 75,4% dari pagu,** realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan realisasinya pada

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp53,1 triliun atau 78,1%. Penyaluran BLT Desa dengan pagu sebesar Rp17,0 triliun untuk 4,72 juta KPM sampai dengan 30 september 2023 telah tersalurkan sebesar Rp7,28 triliun dengan sasaran sebanyak 2,90 juta KPM di seluruh desa. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk penyaluran Dana Desa terdiri atas: (a) penyaluran Dana Desa non-BLT Desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40% paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, serta tahap III sebesar 20% paling cepat bulan Juni; dan (b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulanan setelah persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap.

**Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN tahun 2023.** Pemerintah mengalokasikan Insentif Fiskal sebagai instrumen penghargaan yang diberikan bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Sampai dengan 30 september 2023 realisasi penyaluran Insentif Fiskal mencapai Rp2,8 triliun atau 35,3% dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun (58,5%). Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal disebutkan bahwa penggunaan Insentif Fiskal tahun 2023 antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan dukungan dunia usaha serta penciptaan lapangan kerja.

## PEMBIAYAAN ANGGARAN

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp163,0 triliun atau 27,2% dari target pembiayaan anggaran tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp431,8 triliun atau 51,4% dari targetnya dalam Perpres 98 tahun 2022. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembiayaan utang yang fleksibel dan *prudent* serta memperhatikan kondisi kas keuangan negara.

**Pembiayaan utang secara neto terealisasi sebesar Rp198,9 triliun atau 28,6% dari targetnya sebesar Rp696,3 Triliun.** Realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp480,4 triliun atau 50,9% dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022. Realisasi pembiayaan utang tersebut disumbangkan oleh penurunan penerbitan SBN (neto) sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan kas agar semakin efisien serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan saat ini yang memberikan tekanan terhadap pembiayaan utang Pemerintah.

Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan fleksibilitas komposisi pinjaman sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pasar keuangan sehingga risiko tetap dapat dijaga pada level yang *manageable*. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto terealisasi sebesar Rp3,7 triliun yang berasal dari penarikan PDN sebesar Rp5,7 triliun (163,9% terhadap pagunya) dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp2,1 triliun (73,9% terhadap pagunya). Sementara pada pinjaman luar negeri neto terealisasi sebesar Rp13,8 triliun, yang berasal dari penarikan pinjaman Rp70,7 triliun (114,0% terhadap pagunya) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp57,0 triliun (71,7% terhadap pagunya). Penarikan pinjaman luar negeri tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp64,5 triliun. Kenaikan tersebut utamanya disumbangkan oleh penarikan pinjaman tunai yang melebihi pagunya (140,5% dari pagunya). Selanjutnya, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri lebih

tinggi dari realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar negatif Rp57,5 triliun, dikarenakan lebih besarnya jatuh tempo pinjaman dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

**Pemberian pinjaman (neto) terealisasi sebesar Rp3,7 triliun atau 70,5%** terhadap pagunya yang berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar negatif Rp0,3 triliun (31,6% dari pagu) dan realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp4,1 triliun (64,0% terhadap pagunya).

Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi neto sebesar negatif Rp40,0 triliun, terdiri atas Investasi pada program FLPP sebesar negatif Rp18 Triliun, Investasi lembaga LPDP sebesar negatif Rp15 triliun, investasi kepada lembaga LMAN sebesar negatif Rp10 triliun dan Investasi kepada lembaga LDKPI sebesar negatif Rp2 triliun serta investasi kepada organisasi/LKI/BU internasional sebesar negatif 1,6 T. Di sisi lain terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp6,6 triliun yang terdiri atas penerimaan kembali investasi dari BPJT sebesar Rp139,3 miliar dan penerimaan cicilan pokok investasi sebesar Rp6,4 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran kewajiban penjaminan belum ada realisasi (pemindah bukuan ke rekening dana cadangan penjaminan pemerintah). Adapun total saldo rekening tersebut sebesar Rp11,9 triliun, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya, untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.



### TIM REDAKSI

Pengarah : Direktur Penyusunan APBN.

Pimpinan Redaksi : Arie Yanwar Kapriadi.

Redaktur : Arief Masdi, Ahmad Nawawi, Agung Lestanto N.R., Satyo Palapa, Wahyu Dede Kusuma, Waskito Prayogi, Muhammad Zaki Rachman, Ika Ristianingsih, I Made Sanjaya, Farikh Alfa Firori, Ahmad Suaidy, Lisno Setiawan, Angling Nugroho K., Akhmad Iksanuddin, Nandar Ahmad F., Nararia Sanggrama Wijaya, Aji Yudianto.

Desain Layout dan Publikasi: Bayu Segara, Lugis Andrianto, Melisa Rosman, Mellida Ema J. Muchamad Irfan.

Sekretariat : Lufiana Novitasari.

Alamat Redaksi : Direktorat Penyusunan APBN Gedung Sutikno Slamet Lt. 13 Jl. DR Wahidin No. 1 Jakarta Pusat  
Telp: (021) 3849315 Email: penyusunan.apbn@gmail.com

**DISCLAIMER :** Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar.